



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS LAMPUNG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HABIBULLAH JIMAD
2. Jabatan : WAKIL REKTOR BIDANG UMUM DAN KEUANGAN
3. NHK : 958744

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	2.200.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/54 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI	Rp. 200.000.000	
2. Tanah dan Bangunan Seluas 243 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI	Rp. 525.000.000	
3. Tanah dan Bangunan Seluas 175 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI	Rp. 300.000.000	
4. Tanah dan Bangunan Seluas 419 m2/182 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI	Rp. 575.000.000	
5. Tanah Seluas 6.929 m2 di KAB / KOTA PESAWARAN, HASIL SENDIRI	Rp. 200.000.000	
6. Tanah Seluas 9.167 m2 di KAB / KOTA PESAWARAN, HASIL SENDIRI	Rp. 400.000.000	
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	231.000.000
1. MOTOR, HONDA VARIO AT /125 CC Tahun 2015, HASIL SENDIRI	Rp. 6.000.000	
2. MOBIL, TOYOTA INOVA /2400 CC Tahun 2019, HASIL SENDIRI	Rp. 225.000.000	
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	67.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.398.250.053



F. HARTA LAINNYA

Sub Total

Rp. ----

Rp. 3.896.750.053

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 3.896.750.053

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.